PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

pada Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

LATIFAH DAMAYANTI PUTRI UTAMI
B 200 154 013

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

LATIFAH DAMAYANTI PUTRI UTAMI

B 200 154 013

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing

Drs. Wahyono , M.A, Akt

NIDN.9035801

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

OLEH

LATIFAH DAMAYAANTI PUTRI UTAMI

B200154013

Telah dipertahankan di depan DewanPenguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 9 Mei 2019
dan dinyatakan telah
memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Drs. Wahyono, M.A, Akt** (.....)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si** (.....)
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Drs. Yuli Tri Cahyono, M.M, Akt** (.....)
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Dr. Syamsudin, M.M
NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Mei 2019

Penulis

LATIFAH DAMAYANTI PUTRI UTAMI
B200154013

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan 105 sampel yang terdiri dari Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dalam rentang waktu antara 2015-2017 dengan metode purposive sampling. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LHP LKPD) dan laporan jumlah penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah.

Kata Kunci: belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, jumlah penduduk

Abstract

This study aims to determine the effect of own local revenue (OLR), general allocation fund (GAF) and population of the regional budget distric and city in Central Java province. This study used 105 samples consisting of districts and cities in Central Java between 2015-2017 with a purposive sampling method. The research data used is secondary data in the form of Result of Examination Report of Local Government Financial Statements (RER LGFS) and population reprot. The results of the study show that local government revenue, own local revenue and the number of a population affect regional expenditure.

Key words: regional expenditure, own local revenue, general allocation funds, population.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daaerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumberdaya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli

daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Halim(2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai,belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Penelitian ini dimotivasi untuk mengetahui tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang terdapat di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan.

2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.1.1 Variabel Dependen

Variabel dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak dapat dipisahkan pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah sendiri terdiri dari dua jen is, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung mencakup belanjai pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara itu, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja keuangan serta belanja tidak terduga.

2.1.2 Variabel Independen

2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2.1.2.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemeretaan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pemerataan desentralisasi. Pengukuran DAU sendiri dapat dilakukan dengan menjumlahkan Alokasi Dasar yang bersumber dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah dengan Celah Fiskal yang berasal dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

2.1.2.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah walaupun oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset atau modal dasar pembangunan tetapi

sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilan nya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang bersifat produktif juga rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Mardiasmo, 2007).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-2017 yang ada di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau yang ada di dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2015-2017. Data tersebut bersumber dari website resmi BPK RI Pusat di Jakarta yaitu www.bpk.go.id dan laporan Jumlah Penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) Tahun 2015-2017 yang bersumber dari website resmi BPS RI Pusat Jakarta yaitu www.bps.go.id atau dapat diperoleh secara langsung maupun melalui email dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dengan Prosedur dan Persyaratan yang telah ditentukan.

2.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis regresi linier berganda. Dimana persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 JP + e}$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

α = Konstanta

β_1 β_2 β_3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

JP = Jumlah Penduduk

e = Variabel Residual (tingakat kesalahan)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

Variabel	**Kolmogorov-Smirnov**	**Asymp. Sig. (2-tailed)**	**Keterangan**
Unstandardized Residual	1,232	0,096	Data berdistribusi normal

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Dari tabel 1 diatas menunjukan bahwa besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 1,232 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,096. Nilai tersebut berada di atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada model regresi terdistribusi normal.

3.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	***Tolerance***	**VIF**	**Keterangan**
Pendapatan Asli Daerah	0,727	1,376	Tidak Terjadi Multikolineritas
Dana Alokasi Umum	0,167	5,975	Tidak Terjadi Multikolineritas
Jumlah Penduduk	0,149	6,733	Tidak Terjadi Multikolineritas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 2 bahwa masing-masing nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 untuk setiap variabel. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi multikolineritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

3.1.3 Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,617	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Dana Alokasi Umum	0,071	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Jumlah Penduduk	0,802	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 3 tersebut menunjukan bahwa semua variabel dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

3.2 Uji Hipotesis

3.2.1 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Signifikan
Konstanta	78209845295	0,913	0,363
Pendapatan Asli	1,308	14,553	0,000
Daerah	1,025	5,943	0,000
Dana Alokasi Umum	295413,854	2,728	0,008
Jumlah Penduduk			
R^2 = 0,913		F_{hitung} = 357,722	
Adjusted R^2 = 0,910		Sig/Prob = 0,000	

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

BD = 78.209.845.295 + 1,308PAD + 1,025DAU + 295.413,854JP +ε

3.2.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai F_{hitung} (352,722) dengan Sig. (0,000) < α (0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh

terhadap belanja daerah. Selain itu dengan melihat nilai signifikansi kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa model penelitian fit *(goodness of fit)*.

3.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan untuk nilai *adjusted* R^2 dengan bantuan program SPSS, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *adjusted* R^2 sebesar 0,910. Hal ini berarti bahwa 91% variasi variabel belanja daerah dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk, sementara sisanya 9% diterangkan oleh faktor lain di luar model yang diteliti.

3.2.4 Uji t

Tabel 5 Hasil Uji t

Variabel	**t_{tabel}**	**Sig.**	**Keterangan**
Pendapatan Asli Daerah	14,553	0,000	H_1 diterima
Dana Alokasi Umum	5,943	0,000	H_2 diterima
Jumlah Penduduk	2,728	0,008	H_3 diterima

Sumber: Hasil olah data, 2019

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa:

a. Nilai t_{tabel} untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 14,553 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 5% sehingga **H_1 diterima**, yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.
b. Nilai t_{tabel} untuk variabel dana alokasi umum sebesar 5,943 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 5% sehingga **H_2 diterima**, yang artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah.
c. Nilai t_{tabel} untuk variabel jumlah penduduk sebesar 2,728 dan nilai signifikan sebesar 0,008 > 5% sehingga **H_3 diterima**, yang artinya jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil tabel 5 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 14,553 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 5% sehingga **H_1 diterima**, yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tingginya pendapatan asli daerah suatu Kabupaten/Kota maka akan semakin tinggi pula belanja daerah yang dikeluarkan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wati dan Fajar (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerahberpengaruh terhadap belanja daerah.

3.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil tabel 5 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel dana alokasi umum sebesar 5,943 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 5% sehingga **H_2 diterima**, yang artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum pada suatu daerah akan semakin tinggi pula belanja daerahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ernayati (2017) yang menyatakan bahwadana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah.

3.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penghentian Prematur Prosedur Audit

Dari hasil tabel 5 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel jumlah penduduk sebesar 2,728 dan nilai signifikan sebesar 0,008 > 5% sehingga **H_3 diterima**, yang artinya jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa, semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah maka belanja daerah wilayah tersebut cenderung semakin besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isramiwati, Rasuli dan Taufik (2017) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

a. Variabel pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja daerah, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H_1 diterima.
b. Variabel dana alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H_2 diterima.
c. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap waktu penyelesaian audit, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 < 0,05 sehingga H_3 diterima.

4.2 Keterbatasan

a. Dalam penelitiann ini hanya mengambil sampel hanya pada Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil penelitian hanya berlaku pada tempat yag dijadikan objek penelitian.
b. Riset dilakukan hanya menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 – 2017, tanpa dilakukan konfirmasi dalam bentuk wawancara atau kuesioner untuk mengetahui kendala - kendala dalam pencapaian kinerja yang baik.

4.3 Saran

a. Penelitian selanjutnya diharapkan pada objek penelitian bukan hanya pada satu provinsi, sehingga hasil penelitian lebih dapat mewakili daerah lain secara simultan.
b. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder saja, hendaknya melakukan konfirmasi langsung pada daerah yang menjadi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.

Andri, Devita, Arman Delis, Junaidi. 2014, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi". Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.

Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah).

Ernayanti, Rihfenti. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol. 1.1.

Gani, William dan Septiyan Bayu Kristanto. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupatan/Kota di Pulau Sumatra. E-Jurnal Universitas Kristen Kridya Wacana. Vol. 9.2.

Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 4.

Gregorio, Jose De and Pablo E. Guidotti. 1995. Financial Development and Economic Growth. Journal of International Monetary Fund. V. 23, No. 3, pp. 433-448.

Halim, Abdul. 2001. Anggaran daerah dan "fiscal stress" (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16 (4): 346-357.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.

Lasono, Bagus Bowo dan Subowo. 2014. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. E-Jurnal Universitas Negeri Semarang. Vol. 3.4.

Maimunah, Mutiara. 2006. Meneliti tentang Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Simposium Nasional Akunatnsi IX, Padang.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. Konsep Ideal Akuntabilitas dan Tranparansi Organisasi Layanan Publik. MEP UGM: Yogayakarta.

Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. E-Jurnal Universitas Diponegoro. Vol. 18.1.

Santoso, Singgih. 2010. Statistik Parametrik, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Cetakan Pertam. PT Elex Media Komputindo: Jakarta. PT Gramedia: Jakarta.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Wati, Masayu Rahma dan Catur Martian Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. E-Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas BSI. Vol. 1.1.